

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang telah lama dialami Bangsa Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah merdeka, kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah. Meskipun upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan bahkan sampai sekarang, namun tetap saja kemiskinan masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin Indonesia selalu mengalami fluktuasi, meskipun cenderung turun secara lambat. Edi Suharto<sup>1</sup> menyatakan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural seperti sistem ekonomi yang tidak adil, banyaknya tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), adanya diskriminasi sosial, atau tidak adanya jaminan sosial. Selain itu, kemiskinan juga merupakan masalah yang bersifat multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, namun juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam pengentasannya dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan mencakup semua dimensi tersebut.

Jika melihat catatan Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan, sejak tahun 1970 hingga 2013<sup>2</sup> jumlah penduduk miskin di pedesaan selalu lebih besar

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 17.

<sup>2</sup> Lihat <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>

dibandingkan dengan penduduk miskin perkotaan. Kresnayana Yahya<sup>3</sup> menyebutkan meluasnya kemiskinan di pedesaan disebabkan program-program pembangunan pemerintah terlalu fokus pada sektor industri dan perkotaan, padahal mayoritas penduduk lebih banyak tersebar di pedesaan dan banyak yang bekerja di sektor informal.

Sejak masa Orde Baru, berbagai program telah dicanangkan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang memberikan dukungan dana sebanyak Rp. 20 juta per desa tertinggal. Selain memberikan bantuan berupa dana, IDT juga memberikan pelatihan, supervisi dan tenaga pendamping. Tak hanya itu, IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan bantuan lain yang disesuaikan dengan kondisi desa. Selain IDT, terdapat pula Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat yang mencapai nominal antara Rp. 500 juta – 1 milyar disesuaikan dengan jumlah penduduk<sup>4</sup>.

Disamping IDT dan PPK banyak sekali program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah baik untuk pedesaan , perkotaan maupun sektor lain seperti pertanian dan kelautan. Bappenas<sup>5</sup> menyebutkan berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah, seperti P4K (Proyek

---

<sup>3</sup> Kresnayana Yahya (2012) dalam Bappenas, *Evaluasi PNPM Mandiri*, 2013, hlm. 33

<sup>4</sup> Bappenas, *Evaluasi PNPM Mandiri*. 2013, hlm. 14-16

<sup>5</sup> Bappenas, *Ibid*, hlm. 14-16

Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Tidak terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah membuat berbagai program tersebut kurang membuahkan hasil yang baik bagi penurunan kemiskinan. Sehingga, memasuki masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2007 disahkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh. Secara umum, tujuan dari pelaksanaan PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. PNPM Mandiri lebih memfokuskan kegiatannya pada pemberdayaan masyarakat dibanding dengan hanya sebatas memberikan bantuan langsung. Sehingga nantinya diharapkan akan tercipta kemandirian masyarakat yang berdaya dalam mengangkat dirinya sendiri dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, PNPM juga mengutamakan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan langsung masyarakat sebagai pelaku utama (*bottom up*), juga mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Salah satu program yang tergabung dalam PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri Pedesaan atau yang biasa disingkat PNPM MPd. Lokus kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah pada tingkat kecamatan. Bentuk kegiatan dalam PNPM MPd adalah dengan pengembangan masyarakat dan pemberian dana stimulan. Masyarakat dibina untuk dapat memetakan sendiri potensi yang mereka miliki serta masalah apa yang mereka hadapi untuk kemudian dibuatkan solusinya dalam bentuk berbagai kegiatan yang nantinya akan diberikan dana stimulan.

Terhitung sejak dijalankan tahun 2007 dan selesai pada tahun 2014, PNPM Mandiri khususnya PNPM MPd sudah berjalan selama delapan tahun. Dengan waktu yang cukup lama dan alokasi dana yang cukup besar yaitu maksimal Rp. 3 Milyar per kecamatan<sup>6</sup>, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan perlu dikaji tingkat keberhasilannya dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Dalam kurun waktu delapan tahun tersebut, pelaksanaan PNPM Mandiri secara umum dikatakan sudah memberikan dampak yang signifikan. Pada tahun 2010 SMERU<sup>7</sup> memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan partisipasi warga dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Mandiri, dan peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan untuk membuka akses pedesaan ke pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sementara itu Bappenas<sup>8</sup> dalam evaluasi PNPM Mandiri menemukan bahwa konsumsi rumah tangga penerima PNPM Mandiri Pedesaan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 93

meningkat sebanyak 3 %, dan memiliki lebih besar kemungkinan keluar dari kemiskinan sebesar 2,3 %.

Desa Pohgading merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran pelaksanaan PNPM MPd di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pada tahun 2007, tercatat sebanyak 580 rumah tangga miskin (RTM) di desa ini dengan rincian 74 RTM sangat miskin, 297 RTM miskin, dan 209 RTM hampir miskin. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.061 jiwa yang mayoritas mata pencahariannya adalah buruh tani dan pendidikan terakhir adalah tingkat Sekolah Dasar serta kondisi infrastruktur yang buruk<sup>9</sup>, maka pelaksanaan PNPM MPd di desa ini perlu untuk dikaji, untuk mengetahui seberapa besar dampak PNPM MPd dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja hasil PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Pohgading ?
2. Bagaimana dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pohgading ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian :

1. Mengetahui apa saja hasil PNPM Mandiri di Desa Pohgading.
2. Mengetahui dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pohgading.

---

<sup>9</sup> <http://pohgadingpati.blogspot.co.id/> diakses pada 3 oktober 2015: 21.08 WIB

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pengembangan kajian ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan yang terkait dengan dampak program pengentasan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat .

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan PNPM Mandiri khususnya PNPM Mandiri Pedesaan tentang dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri.

**D. Kerangka Dasar Teori**

**1. Tinjauan Pustaka**

Penelusuran teori untuk mendukung analisis tentang dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pohgading dilakukan lebih dulu dengan pemetaan terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Mahendra Romus Nurlasera pada tahun 2013 melakukan penelitian untuk mengevaluasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Evaluasi yang dilakukan ditinjau dari proses pemberdayaan ekonomi pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Teluk Belitung sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat

dari partisipasi masyarakat yang besar dalam kegiatan pembangunan fisik (aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan) maupun kegiatan pemberdayaan berupa kegiatan simpan pinjam kelompok usaha yang berimbas positif terhadap kegiatan ekonomi kelompok peminjam<sup>10</sup>.

Pada tahun yang sama, mahasiswa Fisipol Universitas Mulawarman, Intan Sumiyati juga melakukan penelitian tentang implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di dua desa sekaligus, yaitu Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap Kalimantan Timur. Intan memfokuskan penelitiannya pada tiga tahapan implementasi yaitu perencanaan-pelaksanaan-evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perancangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di dua desa ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Namun terjadi masalah pada tahap pelaksanaan, tepatnya pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimana dana bergulir yang diberikan disalahgunakan oleh penerima. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha mikro/rumahan agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan justru digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari yang bukannya merupakan tujuan kegiatan SPP. Sehingga berpengaruh pada kegiatan SPP pada tahun berikutnya<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Mahendra Romus Nurlasera, *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Proses Pemberdayaan Ekonomi Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perdesaan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti*. UIN Sultan Syarif Kasim, 2013

<sup>11</sup> Sumiyati, Intan. 2013. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Desa Sepala Dalung Dan Desa Sesayap)*. eJournal Pemerintahan Integratif. Volume 1, No. 1

Masih pada fokus penelitian yang sama (SPP), Melda Palimbunga berdasarkan penelitiannya di Kelurahan Maridan tahun 2013 mengemukakan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan sudah berjalan optimal, hanya saja terdapat beberapa hal yang sedikit cacat yaitu proses sosialisasi SPP yang tidak dilakukan secara langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan diwakilkan oleh ketua-ketua RT. Selain itu proses verifikasi pengajuan dana juga menyalahi prosedur, yaitu tetap di setujuinya pengajuan dana padahal persyaratannya kurang lengkap. Selain menyoroti SPP, Melda juga meneliti program pembangunan sarana air bersih, yang juga melewati batas waktu yang ditetapkan. Berbagai hambatan yang terjadi tersebut disebabkan karena dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah SDM yang kurang berkapasitas, kurangnya transparansi dan komunikasi TPK. Faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan<sup>12</sup>.

Selanjutnya, hampir sama dengan penelitian sebelumnya, Nurcholis pada tahun 2013 meneliti pelaksanaan SPP di Desa Bukit Harapan Kabupaten Lingga. Hasilnya menyebutkan bahwa pelaksanaan SPP belum optimal dikarenakan SDM penerima dana belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang wirausaha dan pemanfaatan dana dengan baik. Selain itu terhambat pula pada masalah pemasaran, pemerintah dianggap hanya

---

<sup>12</sup> Palimbunga ,Melda .2013. *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. eJurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1, No. 1

menyediakan dana tetapi tidak menyediakan pasar sebagai kelanjutan dari pemberian dana tersebut. Kemudian para fasilitator juga dianggap kurang dalam memberikan pelatihan kepada para penerima dana, sehingga mereka tidak berkapasitas untuk mengelola dana yang mereka terima<sup>13</sup>.

Terakhir, Mutakin dkk melakukan penelitian mengenai efektivitas PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2013 dalam menunjang pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri sudah cukup efektif dalam menunjang pembangunan pertanian. Efektivitas tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu : tingkat pengetahuan anggota kelompok mengenai PNPM Mandiri Pedesaan, peran Fasilitator Kecamatan (FK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta jumlah dana yang diberikan. Sedangkan partisipasi anggota kelompok tidak mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri untuk pembangunan pertanian<sup>14</sup>.

Perbedaan penelitian penulis dengan kelima penelitian diatas adalah pada fokus penelitian dan variabel yang digunakan. Pada penelitian pertama mengevaluasi PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) dari segi proses pemberdayaan ekonomi. Penelitian kedua fokus pada proses implementasi meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Kemudian penelitian

---

<sup>13</sup> Nurcholis .2013. *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pedesaan Di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga Tahun 2013*. Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>14</sup> Mutakin, Sumaryo Gs., Rabiatul Adawiyah . April 2013. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp) Dalam Menunjang Pembangunan Pertanian Di Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat*. JIIA. Volume 1 , No. 2

ketiga dan keempat meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan PNPM MPd (khusus pelaksanaan SPP), dan penelitian kelima meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PNPM MPd untuk pengembangan pertanian. Pada rencana penelitian kali ini lebih kepada melihat dampak PNPM Mandiri Perdesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dampak yang dimaksud adalah dampak positif dari implementasi program tersebut.

## **2. Evaluasi Dampak**

Salah satu tujuan dari evaluasi kebijakan adalah usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan<sup>15</sup>. Dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan<sup>16</sup>. Dampak dapat diindikasikan dengan melakukan pengukuran secara hati-hati terhadap berbagai akibat yang muncul dalam periode tahun, untuk membuktikan atau paling tidak membuat estimasi sejauh mana hasil-hasil program telah sesuai dengan harapan yang diinginkan<sup>17</sup>. Periode tahun yang dimaksud adalah jangka waktu tertentu, semakin strategis suatu kebijakan maka semakin diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang, sebaliknya semakin teknis suatu

---

<sup>15</sup> James E Anderson (1969) dalam Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2002, hlm. 170

<sup>16</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 122

<sup>17</sup> Solahuddin Kusumanegara, *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2010, hlm. 133

kebijakan maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lebih cepat sejak kebijakan diimplementasikan.

Rossi dan Freeman (1993) menyatakan bahwa :

“Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang masuk akal ... Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan ‘efek bersih’ dari sebuah intervensi— yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu “.<sup>18</sup>

Carol H. Weiss<sup>19</sup> menyatakan bahwa riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi atau rekomendasi dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang. Bertumpu pada uraian tersebut, evaluasi kebijakan menurut Weiss<sup>20</sup> mengandung beberapa unsur penting :

- a. Untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
- b. Dampak tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan standar.

---

<sup>18</sup> Rossi dan Freeman (1993) dalam Wayne Parsons, *Public Policy*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 604

<sup>19</sup> Weiss (1972) dalam Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia, 2007, hlm. 114

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 114-115

- c. Perbandingan antara dampak dan tujuan menekankan pada kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi.

Peter S. Rossi (1979)<sup>21</sup> menyatakan bahwa riset evaluasi dampak lebih mengarah pada sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intended impact*). Riset ini bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sehingga perlu dirumuskan dengan jelas pendefinisian tujuan dan kriteria keberhasilan secara lebih operasional. Suatu kebijakan/proyek dikatakan mempunyai dampak manakala kebijakan/proyek tersebut dapat mencapai perubahan kearah tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dampak ini mempunyai arti penting ketika kita ingin membandingkan suatu kebijakan yang berbeda dan menguji penggunaan usaha-usaha baru untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.<sup>22</sup> Berikut perbedaan evaluasi dampak kebijakan dengan tipe evaluasi yang lain, menurut Rossi dkk :

**Tabel 1**  
**Perbedaan Tipe Evaluasi Kebijakan**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 121

Tipe Evaluasi				
	Riset Perencanaan & Pengembang an	Evaluasi Monitoring	Evaluasi Dampak	Evaluasi Efisiensi Ekonomi
Tujuan	Merancang kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki	Menguji kesesuaian antara implementasi dengan rancangan	Menguji efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan	Menghitung efisiensi ekonomi kebijakan
<i>Evaluation Questions</i>	1. Luas dan distribusi penyebaran target masalah 2. Penelitian dan pengembangan pada perencanaan dan implementasi program	1. Apakah kebijakan dapat mencapai kelompok sasaran ? 2. Apakah praktiknya telah sesuai dengan rancangan?	1. Apakah kebijakan menyebabkan perubahan yang dikehendaki? 2. Apakah perubahannya signifikan ?	1. Berapa banyak biayanya ? 2. Berapa perbandingan biaya dan keuntungan yang didapat?

Menurut Thomas R. Dye<sup>23</sup> dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. *Pertama*, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, misalnya kelompok miskin, pengusaha kecil, atau lain sebagainya. Selain itu dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan. Misalnya jika program tersebut adalah program anti kemiskinan maka

<sup>23</sup> Thomas R. Dye (1975) dalam Budi Winarno, *op, cit*, hlm. 171-173

pertanyaan yang diajukan adalah apakah tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kesempatan kerja atau merubah perilaku.

*Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok diluar sasaran / tujuan kebijakan (eksternalitas/dampak yang melimpah). *Ketiga*, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan di masa yang akan datang, apakah program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau panjang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Biaya ini baik yang ditanggung pemerintah ataupun swasta. Misalnya biaya swasta untuk membeli alat pengolah limbah akibat kebijakan pengendalian pencemaran. *Terakhir*, evaluasi kebijakan adalah menyangkut biaya-biaya tak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau suatu kelompok akibat adanya kebijakan publik. Biaya tersebut seringkali tidak dipertimbangkan saat melakukan evaluasi karena sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang hendak dipakai, misalnya biaya relokasi atau kekacauan sosial akibat proyek pembangunan kota.

Sedikit berbeda dengan Dye, Islamy (2001) dan Ripley (1985)<sup>24</sup> menyatakan ada empat dimensi utama dari dampak yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Waktu

Semakin lama periode *post initiator* (periode setelah permulaan adanya dampak) dipelajari, maka semakin sulit untuk mengukur dampak, karena rantai kausalitas semakin kabur dan sejumlah pengaruh dari faktor-faktor lain yang ingin dijelaskan akan bertambah banyak dan cepat. Dengan kata lain, akan kesulitan untuk menjaga jejak data individu yang sama dalam waktu yang lama.

b. Keterkaitan Antara Dampak Yang Aktual Dengan Bakal Dampak

Analisis dampak memerlukan perhatian tidak sekedar pada derajat pencapaian program dan apa yang akan dicapai, tetapi juga pada akibat apa yang terjadi jika program hanya tercapai sebagian saja atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Merupakan hal yang sulit untuk mengetahui perbandingan antara dampak yang terjadi dengan bakal dampak. Karena akan sulit bagi peneliti untuk memperkirakan bakal dampak setelah itu. Bisa jadi apa yang timbul kemudian adalah dampak yang bertentangan dengan dampak aktual.

c. Tingkat Agregatif Dampak

---

<sup>24</sup> M. Afran Islamy (2001) dan Randall B. Ripley (1985) dalam Solahuddin Kusumanegara, *Op. cit*, hlm. 134-137

Dampak suatu program terhadap individu dapat dipelajari, dan dampak tingkat individual dapat diagregasikan, di rata-rata , dan dianalisis dengan berbagai cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada unit yang lebih luas dari individu, misalnya kelompok individu atau bahkan masyarakat secara luas.

d. Tipe-tipe Dampak

Ada empat tipe dampak dari program-program yang dapat diuji, yaitu:

I. Dampak Pada Kehidupan Ekonomi

Dalam memperhatikan dampak suatu program pada kehidupan ekonomi individu atau masyarakat, perlu dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada indikator penghasilan, nilai tambah, rasio *cost-benefit*, GNP, dan indikator lainnya.

II. Dampak Pada Pembuatan Keputusan

Kebijakan juga mempunyai dampak terhadap proses kebijakan, yaitu dalam memutuskan apa yang menjadi kebijakan atau program berikutnya.

III. Dampak Pada Sikap-Sikap Publik

Kebijakan atau program juga mempengaruhi sikap orang dalam berbagai bentuk. Baik mereka yang memperoleh keuntungan maupun publik secara keseluruhan, akan memiliki sikap terhadap program tertentu, terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan, terhadap para aparat dan kantor dinas, terhadap kesejahteraan

mereka, dan terhadap kemampuannya untuk mencapai keinginan. Sikap terhadap program mempunyai arti penting terhadap berfungsinya program dan pilihan yang dibuat masyarakat terhadap program dan kebijakan tertentu.

#### IV. Dampak Pada Kualitas Kehidupan

Kebijakan atau program juga memiliki dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok-kelompok individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran terhadap dampak jenis ini dapat bersifat nonekonomis, seperti tersedianya waktu senggang, ketersediaan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, masalah buta huruf, kesehatan, dan kesempatan memperoleh pendidikan. Namun, meskipun demikian dalam kenyataannya tidak semua program mempunyai dampak yang mencakup seluruh dimensi diatas, sehingga analis harus membuat pilihan apa yang akan dianalisis dan menetapkan pengukuran konsep-konsep utamanya.

Dalam melakukan penilaian dampak, ada beberapa metode yang dapat digunakan , antara lain<sup>25</sup> :

- a. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area yang belum menjadi sasaran intervensi

---

<sup>25</sup> Menurut Wayne Parsons, *Op. cit*, hlm. 604

- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu
- e. Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan mempunyai cakupan yang cukup luas. Banyak sekali definisi kesejahteraan yang berbeda-beda, mulai dari mencakup aspek ekonomi seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan pekerjaan, hingga aspek sosial dan spiritual pun termasuk dalam kriteria sejahtera. Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan<sup>26</sup>. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu pembangunan.

---

<sup>26</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 3

Midgley (1997)<sup>27</sup> melihat kesejahteraan sosial sebagai : suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Rumusan diatas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan kehidupan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual tanpa menempatkan suatu aspek lebih penting dari yang lainnya tetapi lebih mengupayakan untuk mendapat titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah aspek sosial, material, dan spiritual.<sup>28</sup>

Dalam definisi tersebut dikemukakan pula bahwa kesejahteraan dibutuhkan agar individu mampu mengembangkan diri, maka dapat diartikan bahwa untuk mencapai kesejahteraan diperlukan kegiatan yang berupa usaha pemberdayaan untuk mengembangkan kemampuan individu, seperti yang dikemukakan oleh Wilensky dan Lebeaux<sup>29</sup> :

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 23

<sup>28</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial* , Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 23

<sup>29</sup> Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux (1965) dalam T. Sumarnonugroho *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Hanindita,1984, hlm. 30

“Suatu sistem yang terorganisasi daripada usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial , untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya, agar supaya individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraannya sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Sejalan dengan Wilensky dan Lebeaux, PPB mengemukakan pula bahwa kesejahteraan sangat berperan dalam menggerakkan atau memberdayakan sumber daya manusia dalam suatu Negara. Lebih dari itu, PBB (1967)<sup>30</sup> juga menyatakan bahwa kesejahteraan sosial berperan pula dalam menggerakkan sumber daya material :

‘... kesejahteraan sosial dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan untuk secara efektif menggali dan menggerakkan sumber-sumber daya manusia serta sumber-sumber material yang ada di suatu Negara agar dapat berhasil menanggulangi kebutuhan-kebutuhan ...’

Kesejahteraan sosial diartikan pula sebagai aktivitas pengorganisasian dan pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama yang kurang beruntung. Salah satu contoh aktivitas tersebut adalah perlindungan sosial yang berupa pemberian bantuan, seperti pendapat Arthur Dunham<sup>31</sup> :

“Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam berbagai bidang”.

---

<sup>30</sup> PBB (1967) dalam T. Sumarnonugroho, *ibid*, hlm. 33

<sup>31</sup> Arthur Dunhan (1965) dalam T. Sumarnonugroho, *ibid*, hlm. 28

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Di Indonesia usaha kesejahteraan sosial dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang yaitu pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan ; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka<sup>32</sup>.

Menurut Ife (1995)<sup>33</sup> pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan yang dimaksud bukan hanya menyangkut kekuasaan politik, melainkan juga kekuasaan atas :

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

---

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Op. cit*, hlm 58

<sup>33</sup> Dalam Edi Suharto, *Ibid*, hlm. 59

- b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau , menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Kesejahteraan sosial adalah ilmu praktik, maka dalam praktiknya membutuhkan berbagai metode intervensi. Dalam konteks intervensi ini maka ruang lingkup kesejahteraan sosial berada dalam tiga wilayah, yaitu pertama :mikro yang mencakup model intervensi secara perorangan. Kedua mezzo yang mencakup intervensi terhadap keluarga maupun kelompok kecil. Ketiga wilayah makro yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai kelompok besar<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial : Paradigma Dan Teori* ,Yogyakarta : Samudra Biru, 2012

## **E. Definisi Konsepsional**

Dalam tahap ini berusaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep dengan konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati.

### **1. Dampak Program**

Dampak merupakan akibat atau perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak yang diakibatkan dari kegiatan nonfisik PNPM Mandiri Pedesaan.

### **2. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Variabel yang digunakan sebagai ukuran adalah :

### **1. Dampak**

#### **a. Dampak Pada Kehidupan Ekonomi**

Dalam memperhatikan dampak suatu program pada kehidupan ekonomi individu atau masyarakat, dilakukan dengan memfokuskan

perhatian pada penghasilan kelompok-kelompok usaha penerima manfaat PNPM MPd Desa Pohgading.

b. Dampak Pada Pembuatan Keputusan

Kebijakan juga mempunyai dampak terhadap proses kebijakan, yaitu dalam memutuskan apa yang menjadi kebijakan atau program berikutnya.

c. Dampak Pada Sikap-Sikap Publik

Kebijakan atau program juga mempengaruhi sikap orang dalam berbagai bentuk. Baik mereka yang memperoleh keuntungan maupun publik secara keseluruhan. Sikap yang akan diteliti adalah sikap penerima manfaat terhadap PNPM MPd, terhadap para pemerintah Desa Pohgading.

d. Dampak Pada Kualitas Kehidupan

Kebijakan atau program juga memiliki dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok-kelompok individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran terhadap dampak jenis ini dapat bersifat nonekonomis, seperti terpenuhinya aspek kesehatan, dan kesempatan memperoleh pendidikan.

## **2. Kesejahteraan**

### **Kelompok Penerima Manfaat**

- a. Peningkatan usaha.
- b. Peningkatan pendapatan.
- c. Peningkatan akses terhadap sumber produktif.

- d. Peningkatan partisipasi publik.

### **Desa**

- a. APBDes
- b. Sarana Prasarana
- c. Pendapatan Desa

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui, menjelaskan dan memberikan gambaran tentang dampak pelaksanaan PNPM MPd terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Banister dkk (1994)<sup>35</sup> mengemukakan bahwa inti dari penelitian kualitatif yaitu suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena , sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Taylor<sup>36</sup> penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Single Program Before-After*. Dalam rancangan ini dilakukan pengukuran kondisi sebelum dan sesudah

---

<sup>35</sup> Banister dkk (1994) dalam Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, hlm. 8

<sup>36</sup> Bogdan dan Taylor (1975) dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 3

pelaksanaan program dan digunakan satu kelompok subyek dan tidak membedakan antara *control group* dengan *eksperimental group*. Menurut Finsterbusch dan Montz (1980)<sup>37</sup> *before-after design* akan memberikan informasi tentang perubahan kelompok sasaran. Pertama-tama dilakukan pengukuran terhadap kondisi awal kelompok tersebut, lalu dikenakan perlakuan untuk jangka waktu tertentu (dalam hal ini perlakuan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan), setelah itu dilakukan pengukuran kembali untuk kedua kalinya setelah dikenakan perlakuan. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah tindakan/perlakuan untuk menentukan seberapa banyak perbedaan yang timbul. Jika ada perbedaan maka harus dipastikan bahwa perbedaan itu terjadi karena tindakan/perlakuan yang diberikan dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Rancangan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

<i>Before</i>	<i>Project</i>	<i>After</i>
Y <sub>1</sub>	X	Y <sub>2</sub>

Prosedur :

- a. Y<sub>1</sub>, adalah mengukur tingkat kesejahteraan kelompok penerima manfaat dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebelum PNPM MPd diimplementasikan.
- b. X, yaitu pelaksanaan PNPM MPd di Desa Pohgading.

---

<sup>37</sup> Dalam AG. Subarsono, *Op.Cit*, hlm. 130

- c.  $Y_2$  , adalah mengukur tingkat kesejahteraan kelompok penerima manfaat dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan setelah PNPM MPd diimplementasikan.
- d. Membandingkan  $Y_1$  dan  $Y_2$  untuk menentukan seberapa besar perbedaan yang timbul , jika ada adalah sebagai akibat dari digunakannya variabel eksperimental X.
- e. Untuk menjamin bahwa perubahan yang terjadi pada setiap indikator dampak adalah akibat dari pelaksanaan PNPM dan bukan dari pengaruh program lain , maka pada penelitian ini dilakukan dengan mengontrol indikator yang hanya terdapat pada PNPM M-Pd. Pada tahun 2007-2014, program-program yang dijalankan pemerintah Desa Pohgading adalah :

**Tabel 2**  
**Program-Program Desa Pohgading**

Pelaku	Th.	Nama Program	Sasaran	Tujuan
KKN Universitas Muria Kudus	2008	Pemberantasan Buta Aksara (PBA)	Warga Desa Pohgading yang mengakami buta aksara	a. Meningkatkan Angka Melek Huruf Desa Pohgading
KKN Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang	2009	Pembuatan Sertifikasi tanah Massal dan SIM Massal	Pemilik tanah yang belum bersertifikat dan pengemudi yang belum memiliki surat izin	a. Membantu masyarakat dalam memenuhi kelengkapan berkendara dan kepemilikan tanah
Bappenas, DPU, Depdagri, Depkes, Depdiknas	2013	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (Pamsimas): a. Penyediaan Sarana Air Minum b. Pembangunan Sarana Sanitasi di Sekolah c. Pelatihan Badan Pengelola	a. 325 rumah di Desa Pohgading b. SDN Pohgading c. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS)	a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana air bersih maupun sarana sanitasi yang saniter. b. Peningkatan derajat kesehatan kualitas hidup dan produktifitas kerja c. Peningkatan kapasitas BP SPAMS
Kementrian Pendidikan	2011	Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) : a. Pembangunan tanman baca dan belajar b. Kegiatan kesenian wayang kulit, karawitan, kethoprak c. Pendidikan keaksaraan	a. Masyarakat Desa Pohgading	a. Penanaman rasa gemar membaca b. Penyediaan sarana belajar dan membaca c. Penguatan karakter melalui seni budaya d. Penuntasan buta aksara

Dinas Pendidikan	2010	Desa Vokasi : a. Pelatihan bertanam kacang panjang dan pemberian bibit b. Pelatihan beternak kambing dan pemberian kambing peranakan etawa c. Pelatihan beternak ayam dan pemberian DOC (bibit ayam)	a. Kelompok Tani kacang panjang b. Kelompok ternak kambing c. Kelompok ternak ayam	a. warga belajar dapat menguasai kompetensi dan mahir dalam bidang kompetensi yang dipilihnya b. Memberikan keterampilan kerja bagi warga c. Menumbuhkan jiwa wirausaha dengan memberikan pendidikan dan latihan keterampilan e. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam
Gubernur Jateng	2011	<i>Bali Ndeso Mbangun Deso</i> : a. Bantuan bibit lele dan kolam terpal b. Pelatihan perbengkelan dan bantuan alat-alat bengkel c. Bantuan benih padi, jagung	a. Kelompok budi daya ikan lele b. Pemuda Karang Taruna c. Kelompok tani Ngudi Utomo	a. Tercukupinya kebutuhan bahan pokok hayati b. Tersedianya sarana prasarana peternakan, perikanan, dan pengembangan usaha perbengkelan
PNPM M-Pd	2007-2014	Pembedayaan dan pemberian bantuan : a. Membangun sarana-prasarana b. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan	a. Pemerintah Desa b. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	a. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar yang diprioritaskan masyarakat b. Menyediakan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro c. Pengurangan RTM dan meningkatkan ekonomi rumah tangga

Dari berbagai program yang dilaksanakan di Desa Pohgading tersebut, terdapat perbedaan dengan PNPM M-Pd, antara lain :

- Sasaran dan tujuan masing-masing program berbeda dengan PNPM M-Pd,
- Program-program tersebut juga tidak bersifat kontinu seperti PNPM M-Pd,
- Program desa vokasi dan *bali ndeso mbangon deso* lebih menekankan kepada pelatihan dan tidak bersifat berkelanjutan.

Sehingga implementasi program-program tersebut tidak mempengaruhi kondisi empat indikator kesejahteraan kelompok penerima manfaat PNPM M-Pd.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti melalui wawancara. Dalam hal ini pihak yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Pohgading adalah :

**Tabel 3**

**Daftar Narasumber**

<b>No.</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Nama Kelompok</b>	<b>Jabatan</b>
1	Puji Lestari	Arisan PKK Rw. 01	Ketua
2	Saodah	Arisan PKK Rw. 02	Ketua
3	Murtini	Kader PKK Rt. 01 Rw. 01	Ketua
4	Siti Komariyah	Yasinan Perempuan Rt. 01 Rw. 02	Ketua
5	Suryatun	Arisan Dk. Sumuran Rt. 01 Rw. 03	Ketua
6	Suyati	Yasinan Putri Dk. Sumuran Rt. 01 Rw. 03	Ketua
7	Kamsih	Yasinan Putri Dk. Bajangan Rt. 01 Rw. 04	Ketua
8	Ngatinah	Yasinan Putri Dk. Bajangan Rt. 02 Rw. 04	Ketua
9	Endangyati	Yasinan Putri Dk. Alastuwo Rt. 01 Rw. 05	Ketua
10	Sukinah	Yasinan Putri Dk. Rambutan Rt. 01 Rw. 06	Ketua
11	Rusmini	Yasinan Putri Dk. Rambutan Rt. 02 Rw. 06	Ketua
12	Parso	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Ketua

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM MPd Desa Pohgading.

**Tabel 4**

**Daftar Dokumen**

No.	Dokumen
1.	Dokumen Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Desa Pohgading
2.	PTO PNPM Mandiri Pedesaan
3.	APBDesa Pohgading Tahun 2008-2014

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan adalah :

**a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yaitu pihak narasumber menyadari bahwa bahwa dirinya sedang diwawancarai. Informan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah ketua kelompok penerima manfaat kegiatan PNPM MPd Desa Pohgading dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) . Dalam kegiatan SPP ada 11 ketua yang akan menjadi narasumber yaitu Puji Lestari, Saodah, Murtini, Siti Komariyah, Suryatun, Suyati, Kamsih, Ngatinah, Endangyati, Sukinah,

dan Rusmini. Selain para penerima manfaat, peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

**b. Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, atau arsip yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan-peraturan perundangan, buku pedoman, dan data pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian ini dokumen yang akan dipelajari adalah dokumen Penyelesaian Pelaksanaan PNPM MPd Desa Pohgading, PTO PNPM Mandiri Pedesaan, APBDesa Tahun 2008-2014

**c. Kuisisioner**

Kuisisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden . jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner langsung tertutup yaitu kuisisioner yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri, kemudian semua alternative jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam kuisisioner tersebut.

**4. Teknik Analisa Data**

Menurut Patton (1980), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar<sup>38</sup>. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, data selanjutnya direduksi ke dalam pola-pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi atau memilah-milah dan menyatukan tema yang memiliki kesamaan. Setelah dilakukan kategorisasi, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan kategori tersebut berdasarkan skema-skema yang didapat. Data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang telah dikategorikan kedalam tema-tema tertentu atau kategori-kategori tertentu kemudian diberi kode (*coding*). Setelah tahapan-tahapan tersebut selesai maka dilakukan penafsiran data dan mengolah data untuk kemudian ditarik kesimpulan .

---

<sup>38</sup> Patton (1980) Dalam Lexy J. Moleong, *ibid*, hlm. 103